BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Pemberdayaan

Menurut Pranarka dan Vidhyandika (1996:1) Konsep Pemerdayaan (*empowerment)* mulai tampak ke permukaan sekitar dekade 1970-an, dan terus berkembang sepanjang dekade 1980-an hingga 1990-an (akhir abad ke-20). Kemunculan konsep ini hampir bersamaan dengan aliran-aliran, seperti eksistensialisme, fenomenologi, dan personalisme. kemudian masuknya gelombang pemikiran neo-marxisme, freudianisme, termasuk di dalamnya aliran – aliran strukturalisme dan sosiologi kritik sekolah Frankurt. Bermunculan pula konsep – konsep seperti elite, kekuasaan,anti kemapanan (*anti-establishment)*, gerakan populis, antistruktur,legitimasi,ideologi,pembebasan, dan civil society.

Berdasarkan kutipan di atas dijelaskan bahwa konsep pemberdayaan terus berkembang seiringnya waktu, mulai dari tahun 1980-an hingga 1990-an. Konsep pemberdayaan ini bermunculan seiringan dengan konsep – konsep lainnya seperti eksistensialisme, fenomenologi, dan personalisme. Ini membuktikan bahwa konsep pemberdayaan sudah ada sejak lama dan masih berkembang sampai sekarang.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment)*, berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu

sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat diubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas ada pengertian di atas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna.

Menurut (Suharto 1997:210-224) pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom)*, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber – sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang – barang dan jasa – jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan – keputusan yang mempengaruhi mereka.

Berdasarkan kutipan di atas dijelaskan bahwa pemberdayaan tergantung pada kemampuan orang, contohnya kelompok yang lemah. Pemberdayaan yang dilakukan kepada kelompok yang lemah harus memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapatnya. Kemudian mendapatkan pendapatan yang layak sehingga mampu mendapatkan

barang atau jasa yang diperlukan, kemudian berpartisipasi dalam pembangunan atau keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut Ife (1995:61-64) dalam bukunya yang berjudul *Community Development: Creating Community Alternativs, Vision, Analysis and Practice* menjelaskan bahwa Pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bikan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

1. Pilihan – pilihan personal dan kesempatan – kesempatan hidup : kemampuan dalam membuat keputusan – keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
2. Pendefinisian kebutuhan : kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
3. Ide atau gagasan : kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
4. Lembaga - lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan memengaruhi pranata – pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.
5. Sumber – sumber : kemampuan memobilisasi sumber – sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
6. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
7. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu – individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka emberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial ; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya

baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupannya.

Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dan kolektif, Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan kekuasaan kekuatan yang berubah antar individu, kelompok dan lembaga. Pemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaan powerlessness (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan), tidak berdaya, tidak mampu menolong diri sendiri, kehilangan kemampuan untuk mengendalikan kehidupan sendiri (Prijono, 1996:54). Selain itu pemberdayaan adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk, berpartisipasi dalam berbagi pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga - lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise dalam Sutrisno (2005:18) yang berjudul Manajemen Keuangan ; Teori, Konsep dan Aplikasi ada lima macam yaitu:

1. Pendekatan dari bawah (*buttom up approach*) pada kondisi ini pengelolaan dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
2. Partisipasi (*participation*) dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.

3. Konsep keberlanjutan merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
4. Keterpaduan yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.
5. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan.

Dapat dijelaskan bahwa prinsip utama untuk pengembangan konsep pemberdayaan masyarakat adalah pendekatan yang dilakukan dari bawah yang dilakukan *stakeholder* untuk mencapai tujuannya, kemudian diikuti juga dengan partisipasi dari semua aktor yang terlibat dalam kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan yang didukung keterpaduan antara anggota dan keuntungan sosial yang merupakan bagian dari program pengelolaan pemberdayaan.

Wahab (2002:81-82) dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Keimplementasi Kebijaksanaan Negara menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) pendekatan yang dapat dilakukan dalam *empowerment*, yaitu:

1. *The welfare approach*, pendekatan ini mengarahkan pada pendekatan manusia dan bukan memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dan kemiskinan rakyat, tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakat dalam pendekatan *centrum of power* yang dilatar belakangi kekuatan potensi lokal masyarakat.
2. *The development approach*, pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan proyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keberdayaan masyarakat.
3. *The empowerment approach*, pendekatan yang melihat bahwa kemiskinan sebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidak berdayaan.

Dapat dijelaskan bahwa pendekatan pemberdayaan dilakukan dengan beberapa cara yaitu meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keberdayaan masyarakat dan melatih masyarakat untuk mengatasi ketidak berdayaan akibat

proses politik dengan cara menonjolkan potensi lokal yang dimiliki masyarakat sehingga mereka bisa bergantung pada ‘ciri khas’ mereka sendiri.

2.1.1.1. Proses Pemberdayaan

Unsur utama dari proses pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kwenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan, oleh karena apabila masyarakat telah memperoleh kewenangan tetapi tidak atau belum mempunyai kapasitas untuk menjalankan kewenangan tersebut maka hasilnya juga tidak optimal. Masyarakat berada pada posisi marginal disebabkan karena kurang memiliki kedua unsur tadi, kewenangan dan kapasitas kondisi tersebut juga disebut mempunyai peluang untuk mengatur masa depannya sendiri. Hal itulah yang diaggap sebagai penyebab utama kondisi kehidupan tidak sejahtera.

untuk memperoleh kewenangan dan kapasitas dalam mengelola pembangunan, masyarakat perlu diberdayakan melalui proses pemberdayaan atau *empowerment.* Menurut pendapat Korten (1987:7),”memahami *power* tidak cukup dari dimensi distributif akan tetapi juga dari dimensi generatif”. dalam dimensi distributif, berdasarkan terminolgoi personal, *power* dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Menurut pendapatnya, seebagai dasar pemahaman pengertian pemberdayaan dalam pembangunan, *power* dalam dimensi generatif justru lebih penting. Suatu kelompok hanya akan memperoleh tambahan atau peningkatan *power* dengan mengurangi *power* kelompok lain. Kelompok yang bersifat *powerless* akan memperoleh tambahan

power atau *empowerment*, hanya dengan mengurangi *power* yang ada pada kelompok *powerholders*

2.1.2 Falsafah Pemberdayaan

Kata falsafah adalah bahasa arab. Dalam bahasa Yunani adalah *philosophia*, *philos* artinya cinta, senang dan *sophia* artinya pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Menurut Asngari (2003) di dalam buku Pemberdayaan Masyarakat di Era Global halaman 55 yang dikutip oleh Oos mengatakan bahwa Falsafah dalam bahasa yunani berarti *love of wisdom*, cinta akan kebijaksanaan yakni menunjukkan harapan/kemajuan untuk mencari fakta dan nilai kehidupan yang luhur. Filsafat berarti cinta pada kebijaksanaan yaitu ingin mengetahui secara mendalam dan mendasar tentang kebenaran sesuatu. Tujuannya adalah untuk menemukan kebenaran yang hakiki tentang sesatu yang dipikirkan. Falsafah mengarahkan pada suatu pemahaman yang mendasari atau menjadi landasan melaksanakan kegiatan yang lebih layak untuk mendapatkan hasil yang lebih prima. Jadi makna falsafah adalah sebagai pemahaman yang mendasari atau menjadi landasan individu (pandangan hidup) dalam melakukan sesuatu perbuatan yangn diyakini kebenerannya untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Profesinya seperti guru, dosen, penyuluh pendamping, kader, penggerak pembangunan, relawan, atau bentuk agen pemberdayaan lainnya Hakikatnya adalah sama sebagai agen pembaharu (*agent of changes*). untuk melaksanakan tugasnya sebagai agen pembaharu dalam melaksanakan tugas yang diyakini benar.

Falsafah bagi agen pemberdayaan dalam memberdayakan SDM diantaranya dapat menganut falsafah pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan menrut ajaran ini dilaksanakan secara *hing ngarsa sung tulada, hing madya mangun karso*, dan *tut wiru handayani*. proses pendidikan atau pemberdayaan dapat dilakukan oleh agen pemberdayaan dengan cara tampil di depan peserta didik, memberikan contoh atau keteladanan. Ada saatnya agen pemberdayaan berpartisipasi aktif, ada di tengah bersama – sama dengan klien/ sasaran sehingga mereka mau melakukan perubahan perilaku ke arah yang diinginkan. Ada pula kesempatan bagi agen pemberdayaan untuk berperan di belakang klien/ sasaran, memberikan dorongan atau motivasi sehingga mereka mau dan mampu melakukan perubahan perilaku sebagai hasil dari proses belajar tersebut. posisi agen pemberdayaan kapan tampil di depan, di tengah, atau di belakang disesuaikan dengan kebutuhan dengan pertimbangan utama klien atau sasaran sebagai subjek sehingga mampu berdaya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya.

Pelaksanaan perubahan terhadap komunitas atau sistem sosial, agen pemberdayaan juga dapat menggunakan falsafah membakar sampah. Falsafah ini sering disampaikan oleh Prof. Pangasngari dari IPB Bogor. untuk membakar sampah, idmulai dengan memilih sampah yang kering. Kemudian sampah kering ini mulai membakar. Jika yang kering sudah terbakar, sampah yang basah lama kelamaan akan mengering dan terbakar pula. Apabila sampah itu basah semua, diperlukan bantuan minyak tanah supaya bisa terbakar.

Filosofi membakar sampah ini dapat diterapkan ketika agen pemberdayaan melakukan perubahan terencana kepada sasaran. Tahap awal, pilihlah sasaran yang

mudah dipengaruhi untuk melakukan perubahan, dalam setiap masyarakat realitasnya selalu ada individu tersebut, baik itu tokoh atau anggota masyarakat biasa. Kemudian lakukan pendekatan dan berikan penjelasan secukupnya tentang proses dan manfaat dari perubahan tersebuh sehingga mereka tahu, mau, dan mampu untuk melaksanakan perubahan tersebut. jika sebagian sasaran tadi sudah mau dan mampu menerima perubahan, diharapkan bisa mempengaruhi terhadap sasaran yang relatif sulit. Namun apabila agen pemberdayaan dihadapkan pada komunitas atau lingkungan sosial yang semuanya sulit untuk dipengaruhi, diperlukan bantuan bentuk lain yang menarik bagi klien/ sasaran, misalnya berbagai kemudahan, hadiah, bantuan, dan bentuk insentif lainnya. Bantuan ini sifatnya hanya pancingan bukan sebagai *charity*. Bantuan ini dapat diberikan sebagai penghargaan (*reward*) kepada anggota masyarakat yang dinilai berhasil atau mau mengikuti perubahan, sekalipun kadarnya masih relatif kecil. bentuk motivasi ini diharapkan klien/sasaran secara bertahap paham, mau dan mampu melakukan perubahan sesuai yang direncanakan.

Falsafah demokratis merupakan salah satu yang perlu diperhatikan oleh agen pemberdayaan. Falsafah ini menekankan bahwa pemberdayaan harus dilakukan dalam suasana yang wajar, menyenangkan, demokratis, menjunjung tinggi hak individu terhadap adanya perbedaan, serta menghindari dengan cara paksaaan. Hubungan antara agen pemberdayaan dengan sasaran, perlu diciptakan dalam suasana yang harmonis dan saling menghargai. Penolakan dan penerimaan dari sasaran terhadap sebuah perubahan yang ditawarkan agen pemberdayaan, merupakan suatu yang lumrah. Didalam suasana seperti ini, yang penting agen

pemberdayaan perlu menciptakan hubungan yang harmonis dengan sasaran, terbuka, dan membangun kepercayaan mereka. Agen pemberdayaan memang perlu memiliki kesabaran dalam mengubah perilaku klien/sasaran. untuk suasana demokratis tersebut, keberhasilan bukan pada hasil akhir, tetapi kualitas proses merpakan hal utama sehingga setiap individu yang menjadi klien/sasaran dapat berdaya secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing – masing.

Pemberdayaan masyarakat juga perlu memegang falsafah kontinyu. Bahwa pemberdayaan sesungguhnya merupakan upaya telapak tangan. Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang ada di tahapan yang jelas dan dibutuhkan waktu(proses). Pemberdayaan harus dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, dan dilakukan secara terus menerus. Oleh karena itu pemberdayaan perlu kesabaran an ketelatenan dari agen pemberdayaan dalam membimbing dan memfasilitasi proses perubahan tersebut.

2.1.3 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pengertian "proses" menunjukan pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sitematis yang mencerminkan pertahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum

berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik *knowledge, attitude*, maupun *practice* menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan-keterampilan yang baik.

Makna dari memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata memperoleh mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. masyarakat yang mencari, mengusahakan, melakukan, menciptakan situasi atau meminta pada pihak lain untuk memberikan daya/ kekuatan/ kemampuan. Iklim seperti ini hanya akan tercipta jika masyarakat tersebut menyadari ketidakmampuan, ketidakberdayaan dan tidak adanya kekuatan, dan sekaligus disertai dengan kesadaran akan perlunya memperoleh daya, kemampuan atau kekuatan. Makna kata pemberian menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Insisatif untuk mengalihkan daya/ kemampuan/ kekuatan, adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah atau agen-agen lainnya. Senada dengan pengertian ini Prijono & Pranarka (1996: 77) menyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian yang pertama adalah *to give power or authority*, pengertian kedua to *give ability to or enable*. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Menurut kutipan diatas menyatakan bahwa pemberdayaan harus memberikan kekuatan atau otoritas kepada pihak yang lemah atau belum berdaya. diberikannya kekuatan atau otoritas tersebut diharapkan pihak yang belum berdaya tersebut bisa memiliki kekuatan untuk meningkatkan kemampuannya.

Menurut Sumodiningrat dalam Ambar Teguh (2004:78-79) menyampaikan bahwa pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia daripada Barat. di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai *empowerment*, dan istilah itu benar tapi tidak tepat. Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi daya bukan kekuasaan daripada pemberdayaan itu sendiri. Barangkali istilah yang paling tepat adalah *energize* atau katakan memberi energi pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri. berdasarkan kutipan diatas mengatakan bahwa pemberdayaan adalah memberikan kekuasaan atau energi pada kelompok atau individu yang ingin diberdayakan agar kelompok atau individu tersebut dapat bergerak secara mandiri dalam kesehariannya.

Tujuan pemberdayaan masyarakat pedesaan adalah meningkatkan kesejahteraannya sehingga mereka dapat menikmati kualitas hidup sebagaimana yang dinikmati oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Strategi pemberdayaan masyarakat pedesaan terpencil dilakukan dengan mewujudkan ke empat elemen pemberdayaan masyarakat: inklusi dan partisipasi, akses pada informasi, kapasitas organisasi lokal, profesionalitas pelaku pemberdaya.

Tantangan utama yang dihadapi dalam memberdayakan masyarakat pedesaan terpencil adalah pengetahuan yang terbatas, wilayah yang sulit dijangkau, dan pemahaman adat yang kuat pada masyarakat adat. guna dapat memasukkan

mereka dalam proses perubahan, maka upaya yang pertama kali perlu dilakukan adalah memahami pemikiran dan tindakan mereka serta membuat mereka percaya kepada pelaku pemberdaya. Selanjutnya mereka perlu berpartisipasi dalam proses perubahan yang ditawarkan dengan memberikan kesempatan menentukan pilihan secara rasional. Proses ini dapat memerlukan waktu yang lama, namun hasilnya akan lebih efektif daripada memberikan pilihan yang sudah tertentu. Pengikutan masyarakat dalam proses perubahan dilakukan secara berangsung-angsur dari kelompok kecil menuju masyarakat lebih luas.

Akses pada informasi dibuka dengan memberikan penjelasan mengenai program-program pemerintah yang akan dilakukan, norma-norma bermasyarakat yang perlu diketahui, ilmu pengetahuan dasar, hak-hak yang mereka peroleh, manfaat perubahan yang akan terjadi, masalah-masalah yang mungkin dihadapi. Pelaku pemberdaya perlu mempunyai kemampuan profesional yang tinggi agar dapat melakukan pendampingan secara baik. Pelaku pemberdaya yang potensial adalah organ pemerintah daerah atau organisasi berbasis masyarakat lokal, yang mempunyai perhatian, komitmen, dan kemampuan untuk membangun masyarakat miskin dan terbelakang. Upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan terpencil, baik masyarakat adat maupun masyarakat lokal, menuntut pola kerja yang fleksibel, tidak terhambat oleh sistem administrasi penganggaran yang ketat. Agar pelaku pemberdaya masyarakat dapat bekerja secara profesional, maka mereka perlu mendapat pelatihan dan pendidikan yang memadai.

Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok,

dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat Pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, ada beberapa aspek pemberdayaan yang dapat dilakukan melalui lima pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan (Suharto, 1997:218-219):

1. Pemungkinan
   Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat miskin dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. Penguatan
   Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan
   Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan
   Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat miskin agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan
   Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Berdasarkan pengertian diatas, bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pelaksanaan proses dan tujuan pemberdayaan untuk memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok lemah agar tidak terjadinya diskriminasi yang dilakukan kelompok kuat terhadap kelompok, agar kelompok lemah tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan

Pemungkinan menjelaskan tentang menciptaan suasana atau iklim dalam melakukan proses pemberdayaan yang memungkinkan masyarakat mengeluarkan potensi terbaiknya, pemerintah membebaskan sekat – sekat kultural dan struktural yang menghambat potensi masyarakat. menurut Sedarmayanti (2009 : 21) dalam bukunya yang berjudul Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja Suasana atau iklim kerja adalah sebagai berikut :

> "Suasana atau iklim kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok"

Suasana atau iklim kerja merupakan lingkungan atau keadaan yang diciptakan oleh aparatur Dinas Koperasi Dan UMKM dalam melaksanakan pemberdayaan Koperasi di Kabupaten Bandung Barat sebagai pengaturan kerja baik perseorangan maupun kelompok.

Penguatan menjelaskan tentang memperkuat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat serta menumbuhkan rasa percaya diri, agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari – hari secara mandiri. pengetahuan ialah merupakan hasil pendidikan dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. penginderaan terjadi melalui panca indera manusia yaitu : indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. sebagian besar

pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Soekidjo, Notoadmodjo 2003). pengetahuan merupakan sesuatu yang diketahui atau hasil tahu yang dimiliki oleh aparatur Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat untuk diberikan kepada Koperasi dalam proses pemberdayaan Koperasi di Kabupaten Bandung Barat.

Perlindungan menjelaskan tentang melindungi masyarakat dari diskriminasi dan persaingan yang tidak sehat dari kelompok – kelompok kuat agar masyarakat yang kurang mampu tidak semakin lemah karena diskriminasi kelompok kuat. penyokongan menjelaskan tentang bimbingan atau dukungan yang diberikan kepada masyarakat agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan sehari – hari dan membimbing agar masyarakat yang lemah tidak semakin lemah.

Menurut Robbin (2000:67) dalam bukunya yang berjudul Perilaku Organisasi menjelaskan bahwa kemampuan adalah sebagai berikut :

> "kemampuan merupakan bawaan kesanggupan sejak lahir atau merupakan hasil dari latihan yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan. Kemampuan tersebut meliputi kemampuan fisik dan kemampuan intelektual. Kemampuan fisik berkaitan dengan stamina dan karakteristik tubuh, sedangkan kemampuan intelektual berkaitan dengan aktivitas mental".

Berdasarkan kutipan diatas dijelaskan bahwa kemampuan yang menjadi tolak ukur setiap manusia dalam menjalankan apa yang seharusnya dikerjakan meliputi kemampuan fisik maupun intelektual, dimana kedua kemampuan tersebut saling berhubungan satu sama lainnya dalam menjalankan aktifitas kerja. menurut Smith dalam McDaniel (1959), bimbingan sebagai proses layanan yang diberikan kepada individu-individu guna membantu mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan-pilihan,

rencana-rencana, dan interpretasi - interpretasi yang diperlukan untuk menyesuaikan diri yang baik.

Bimbingan suatu cara yang diberikan kepada masing-masing individu guna memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan agar dalam pelaksanaan tupoksinya bisa berjalan dengan optimal dalam menyelesaikan permasalahan Koperasi sesuai yang diharapkan. Pierce (dalam Kail and Cavanaug, 2000) mendefinisikan dukungan sebagai sumber emosional, informasional atau pendampingan yang diberikan oleh orang- orang disekitar individu untuk menghadapi setiap permasalahan dan krisis yang terjadi sehari- hari dalam kehidupan.

Pemeliharaan menjelaskan tentang keadaan kondusif yang diciptakan agar terjadinya keselarasan diantara kelompok – kelompok masyarakat yang ada. Dan memungkinan masyarakat bersaing dan mengeluarkan potensi terbaiknya. keseimbangan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM guna meningkatkan efektivitas Koperasi di Kabupaten Bandung Barat harus mempunyai titik tumpu dimana suatu permasalahan Koperasi dapat terselesaikan dengan adanya suatu keseimbangan.

2.1.4 Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau

sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya." Sedangkan Georgopolous dan Tannembaum (1985:50), mengemukakan:

> "Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan mesalah sasaran maupun tujuan."

Selanjutnya Steers (1985:87) mengemukakan bahwa:

> "Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya".

Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: "Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya" (Kurniawan, 2005:109). Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

2.1.4.1 Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (1978:77), yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksdukan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah "pada jalan" yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemamapuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi

tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis (1987:55), yakni:

1. Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Menurut Strees dalam Tangkilisan (2005:141) mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

1. Produktivitas
2. Kemampuan adaptasi kerja
3. Kepuasan kerja
4. Kemampuan berlaba

5. Pencarian sumber daya

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa kriteria dalam pengukuran efektivitas adalah antara lain menggunakan produktivitas kerja, kemampuan adaptasi kerja dari karyawan itu sendiri, kepuasan kerja, kemampuan berlaba karyawan dan pencarian sumber daya dari atasan yang ada di organisasi atau perusahaan tersebut Sedangkan Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985:53) dalam bukunya "Efektrivitas Organisasi" mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

   Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapafaktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongktit.

2. Integrasi

   Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

   Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa untuk mengukur efektivitas Diperlukan beberapa tahap yaitu pencapaian tujuan, dimana suatu pencapaian harus dipandang sebagai suatu proses dalam mencapai suatu tujuan. Kemudian integrasi, yaitu pengukuran terhadap kemampuan suatu perusahaan atau organisasi tersebut. kemudian adaptasi, kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar.

2.1.5 Pengertian Koperasi

Koperasi adalah suatu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian. Kerja sama ini diadakan orang karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Orang – orang ini bersama – sama mengusahakan kebutuhan sehari – hari, kebutuhan yang bertalian dengan perusahaan ataupun rumah tangga mereka. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerja sama yang akan berlangsung terus, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerja sama itu.

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa persyaratan untuk mendirikan koperasi adalah :

1. Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang

2. Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.
3. Pembentukan Koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
4. Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.
5. Anggaran dasar harus memuat sekurang – kurangnya
    a. daftar nama pendiri;
    b. nama dan tempat kedudukan;
    c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
    d. ketentuan mengenai keanggotaan;
    e. ketentuan mengenai Rapat Anggota;
    f. ketentuan mengenai pengelolaan;
    g. ketentuan mengenai permodalan;
    h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
    i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
    j. ketentuan mengenai sanksi.

Berdasarkan kutipan diatas dijelaskan bahwa syarat untuk mendirikan koperasi diantaranya adalah untuk koperasi primer sekurang – kurangnya memiliki anggota 20 orang dan untuk koperasi sekunder sekurang – kurangnya adalah 3 orang. Koperasi harus memiliki tempat kedudukan di Negara Republik Indonesia dan dibentuk dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar koperasi. Di dalam anggaran dasar harus memuat sekurang – kurangnya ,ketentuan mengenai anggota, rapat anggota, pengelolaan, ermodalan, jangka waktu berdiri, pembagian hasil usaha, sanksi, daftar pendiri, daftar nama tempat dan maksud dan tujuan bidang usaha.

Koperasi lahir pada permulaan abad ke-19, sebagai reaksi terhadap sistem liberlisme ekonomi, yang pada waktu itu sekelompok kecil pemilik – pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat. Susunan masyarakat sebagai kelanjutan dari liberalisme ekonomi, membiarkan setiap individu bebas bersaing untuk mengejar keuntungan sebesar – besarnya, dan bebas pula mengadakan segala macam kontrak

tanpa campur tangan pemerintah. Akibatnya, sekelompok kecil pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat. mereka hidup berlebih, sedangkan kelompok besar dari masyarakat. Mereka hidup berlebih, sedangkan kelompok besar dari masyarakat lemah kedudukan sosial ekonominya makin terdesak. Pada saat itulah tumbuh gerakan koperasi yang menentang aliran individualisme dengan asas kerja sama dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Bentuk kerja sama ini melahirkan perkumpulan koperasi.

Koperasi berasal dari perkataan *co* dan *operation*, yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang – orang atau badan – badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Sebagai halnya dengan perkumpulan – perkumpulan lain, maka juga pada koperasi dengan perantaraan sidang umumnya, anggotanya adalah berdaulat. Jalan yang dilakukan orang – orang dalam membentuk perkumpulan serupa itu hampir selalu sama. Seorang atau sekumpulan orang menyelenggarakan suatu pertemuan untuk mencari kerja sama. Pertemuan ini memilih suatu panitia yang menyusun peraturan – peraturan dan kemudian memilih suatu panitia kerja untuk melakukan pekerjaan sehari – hari dan akan mewakili anggota – anggotanya. Kekuasaan tertinggi terletak pada sidang umum tersebut. Pada koperasi yang beranggotakan lebih dari 200 orang. Ada kalanya kekuasaan tertinggi diserahkan kepada suatu dewan yang dipilih oleh anggotanya sendiri. Berdirinya koperasi ini harus disahkan

dengan surat akte pendirian serta diumumkan menurut aturan – aturan yang telah diterapkan pemerintah.

pada koperasi keluar masuknya anggota adalah bebas. Keistimewaannya sebagai suatu perkumpulan terletak pada tujuan pokoknya, yaitu bahwa koperasi mengutamakan peneyelenggaraan kepentingan anggota dalam kebutuhan sehari – hari. Salah satu dasarnya pula bahwa koperasi bekerja untuk seluruh anggota. Tanggungan serta risiko yang berhubungan dengan keanggotaan dipilkul oleh seluruh anggota dengan tidak memandang siapa yang telah mengecap keuntungannya.

Keistimewaan lain yang berhubungan dengan keanggotaannya adalah kedudukan anggota itu. Di satu pihak anggota – anggota itu merupakan pengusaha, di lain pihak anggota – anggota itu merupakan pengusaha. Di lain pihak hubungan anggota dengan perkumpulan bersifat hubungan dagang. Sebagai contoh dalam koperasi pertanian, petani menjadi pengusaha dan rekan dari hasil pertanian, dalam koperasi konsumsi, anggota menjadi pengusaha dan pembeli tetap.

Usaha memenuhi kebutuhan anggota, koperasi adalah serupa dengan suatu perusahaan. Seperti perusahaan dagang biasa, koperasi pun ikut serta mengambil bagian dalam hubungan kemasyarakatan dan perekonomian. Adapun perbedaan antara koperasi dengan perseroan dagang antara lain adalah adanya modal yang tidak tetap. Hal ini disebabkan oleh adanya kebebasan keluar masuknya anggota. Selain itu, modal koperasi kebanyakan kecil, dan dihimpun dari anggota secara saham.

Pentingnya koperasi dalam perekonomian telah diakui oleh umum. Yang sering dilupakan adalah arti koperasi dalam meletakkan dasar demokrasi politik. Pada koperasi, prinsip – prinsip demokrasi politik dalam mendirikan koperasi, anggota menjadi paham akan cara – cara yang demokratis. Mereka belajar bahwa kelompok yang kecil harus tunduk kepada keputusan kelompok yang lebih besar. Sebaliknya kelompok yang lebih besar haruslah mempunyai penghargaan pula terhadap kelompok yang lebih kecil. Hal ini menambah keyakinan dan kesadaran orang kecil bahwa suaranya adalah sama dengan suara orang besar. Dalam koperasi, setiap orang mempunyai hak yang sama, dan semua orang yang sanggup memikul tanggung jawab dijamin akan mendapat hak – hak yang setimpal. Mereka yang mengambil bagian aktif dalam pekerjaan koperasi diserahi pekerjaan – pekerjaan yang sebelum itu tidak pernah dipercayakan kepada mereka.

Ketua koperasi belajar bagaimana memimpin suatu rapat, bendahara belajar bagaimana memegang pembukuan, anggota dewan belajar bagaimana mendapat keputusan atau persoalan – persoalan yang tidak dijumpai dalam kehidupan sehari - hari. Koperasi merupakan suatu balai pendidikan bagi anggotanya. Perkumpulan bebeas serupa itu memberikan rasa tanggung jawab dan kepercayaan bahwa orang biasa dengan kerja sama secara sukarela dengan sesamanya dapat memecahkan persoalan – persoalan yang sebesar apapun. Anggaran dasar koperasi yang berisikan kerja sama untuk kepentingan bersama mengandung banyak pelajaran yang berarati dalam kehidupan rakyat pada umumnya.

Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum

Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diartikan bahwa koperasi adalah suatu badan usaha yang bersifat perseorangan yang merupakan gerakan ekonomi berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Koperasi secara etimologi berasal dari kata *cooperation*, terdiri dari kata *co* yang artinya bersama dan operation yang artinya bekerja atau berusaha. Jadi kata *cooperation* dapat diartikan bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.

Koperasi didirikan sebagai persatuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan (Hatta dalam Revrisond Baswir, 2000: 2). Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan (ILO dalam Revrisond Baswir, 2000: 2).

Menurut Undang – Undang Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Tujuan Koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan keterangan di atas disimpulkan bahwa tujuan koperasi adalah (1)Meningkatkan kesejahteraan anggota, (2)Meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum, (3)ikut membangun tatanan perekonomian nasional. (4) mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Suatu lembaga atau badan usaha mempunyai fungsi dan peran yang menjadi acuan dalam setiap kegiatannya,hal ini sangat penting karena dengan fungsi dan peran, akan menjadi acuan dalam menjalankan kegiatan yang ada.

Sebagai badan usaha koperasi memiliki fungsi dan peran tersendiri yang Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian fungsi dan peran tersebut Diantaranya adalah :

1. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
2. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
3. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
4. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Berdasarkan beberapa fungsi dan peran koperasi tersebut dapat disimpulkan bahwa koperasi ingin menjadikan anggota – anggotanya sejahtera dan mandiri dan berperan secara aktif dalam meempertinggi kualitas kehidupan masyarakat, serta

memperkokoh perekonomian masyarakat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perkonomian nasional.

Karakteristik koperasi berbeda dengan badan usaha lain. Perbedaan antara koperasi dengan bentuk perusahaan lainnya tidak hanya terletak pada landasan dan asasnya, tapi juga pada prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan usaha yang dianut. Prinsip-prinsip pengelolaan koperasi merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas kekeluargaan yang dianutnya.

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Koperasi memiliki beberapa prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
3. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing - masing anggota;
4. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5. kemandirian.

Berdasarkan keterangan diatas prinsip koperasi tersebut bahwa keanggotan koperasi bersifat sukarela yang dikelola secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha tiap anggota, pemberian balas jasa yang diberikan terbatas tergantungan dengan modal, dengan terlaksananya prinsip – prinsip diatas maka diharapkan anggota – anggota koperasi yang ada menjadi mandiri dalam menjalankan kehidupannya.

2.1.5.1 Jenis – Jenis Koperasi

Secara umum penjenisan koperasi di Indonesia telah diatur oleh undang – undang, namun demikian dalam kenyataannya jenis koperasi yang ada cukup beraneka ragam. Oleh karena itu telah juga dimaksudkan sebagai pendekatan untuk memahani gejala – gejala usaha ekonomi yang berdasarkan semangat kerja sama di dalam masyarakat.

Telah disebutkan di awal bahwa maksud orang mendirikan koperasi ialah untuk memperbaiki kehidupannya. Usaha memperbaiki kehidupan itu dicapai untuk memperbaiki kehidupan itu dicapai dengan cara memenuhi kebutuhannya dengan lebih baik. Kalau keperluan dapat kita peroleh dengan harga yang lebih rendah, maka kita akan dapat menghemat untuk membeli barang keperluan lain. Kalau barang hasil keperluan kita sendiri dapat dijual dengna harga yang lebih banyak untuk meningkatkan kehidupan kita. Kita akan menghemat ongkos dan apa yang dihemat dapat dipergunakan untuk pembelian keperluan yang belum dipenuhi.

Dasar penjenisan koperasi Indonesia adalah kebutuhan dari maksud untuk efisiensi suatu golongan dalam masyarakat yang *homogen* karena kesamaan aktivitas dan kepentingan ekonominya, misalnya koperasi yang bersifat khusus seperti koperasi batik, koperasi karet, bank koperasi, koperasi angkutan air/lautm koperasi perumahan, koperasi listrik desa, koperasi asuransi dan koperasi lainnya. Guna kepentingan dan perkembangan daerah kerja serta menjamin efisiensi ekoonomi koperasi yang bersangkutan juga demi ketertiban, diusahakan hanya satu koperasi yang setingkat dan sejenis untuk daerah kerja.

Berbagai jenis koperasi lahir seirama dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Menurut Pandji Anoraga dan Ninik Widyanti (2007:19-27) secara garis besar jenis koperasi yang ada dapat kita bagi menjadi 5 golongan, yaitu :

1. Koperasi konsumsi
2. Koperasi kredit (simpan pinjam)
3. Koperasi produksi
4. Koperasi jasa
5. Koperasi serba usaha

Berdasarkan kutipan diatas disebutkan bahwa terdapat macam – macam jenis koperasi sesuai dengan bidang nya masing – masing dan mempunyai tujuan yang berbeda – beda. Untuk memahami jenis – jenis koperasi yang beraneka macam dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini :

1. Koperasi Konsumsi

   Barang konsumsi ialah barang yang diperlukan setiap hari, misalnya Barang – barang pangan (beras, gula, garam) dan barang – barang sandang (kain batik, tekstil) dan barang pembantu keperluan sehari – hari (sabun, minyak tanah, dan lain sebagainya).

   Tujuan Koperasi ialah agar anggota – anggotanya dapat membeli barang – barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak. Untuk melayani kebutuhan anggotanya. Maka koperasi konsumsi mengadakan usaha - usaha sebagai berikut :

   a. Membeli barang – barang konsumsi keperluan sehari – hari dalam jumlah yang besar sesuai dengan kebutuhan anggota. Di dalam perdagangan terdapat kebiasaan bahwa pembeli akan memperoleh harga yang ringan apabila ia membeli dalam jumlah

yang sekaligus dan jika ia membayar dengan kontan seluruh harganya, maka ia akan mendapat harga yang lebih rendah lagi.

b. Menyalurkan barang – barang konsumsi kepada para anggota dengan harga yang layak. Koperasi konsumsi menyalurkan barang – barang yang dirasakan manfaatnya. Dalam menyalurkan atau menjual barang tersebut kepada para anggota selalu dipertimbangkan bahwa anggota tidak boleh dipaksa membeli barang – barang tersebut.

c. Berusaha membuat sendiri barang – barang konsumsi untuk keperluan anggota. Untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan harga yang sesuai sering pula koperasi membuat sendiri barang- barang yang diperlukan anggota misalnya sepatu, sepeda, tekstil dan lainnya. Dengan demikian maka koperasi tidak semata - mata tergantung pada pihak luar

Koperasi konsumsi yang baik dan sempurna berusaha menyediakan atau mengadakan serta menjual segala macam barang yang dibutuhkan oleh anggota – anggotanya. Untuk mendapatkan barang – barang itu dengan mudah dan muran, dan kemudian dijual kepada anggota – anggotanya denga harga yang seekonomis mungkin, maka koperasi konsumsi berusaha memperoleh serta membeli barang -barang yang dibutuhkan anggota – anggotanya dari pedagang – pedagang besar (grosir) atau langsung.

2. Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam

Koperasi kredit didirkan untuk memberikan kesempatan kepada anggota – anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan bunga yang ringan. Itulah sebabnya koperasi ini disebut engan koperasi kredit. Akan tetapi untuk dapat memberikan pinjaman atau kredit koperasi memerlukan modal. Modal koperasi yang utama adallah simpanan anggota sendiri. Dari uang simpanan yang dikumpulkan bersama itu diberikan pinjaman kepada anggota yang perlu dibantu. Oleh karena itu, maka koperasi kredit lebih tepat disebut koperasi simpan pinjam.

Fungsi pinjaman di dalam koperasi adalah sesuai dengan tujuan koperasi pada umumnya, yaitu untuk memperbaiki kehidupan anggotanya. Misalnya :

a. Dengan pinjaman itu seorang petani dapat membeli pupuk, benih unggul, pacul dan alat pertanian laijnnya yang akan membantu meningkatkan usaha taninya.
b. Dengan uang pinjaman, maka nelayan akan dapat membeli jaring penangkap ikan yang baik sehingga diharapkan pendapatannya dapat bertambah.
c. Dengan uang pinjaman, maka seseorang buruh atau karyawan akan dapat membeli barang yang tak dapat dibeli dari upah atau gajjinya. Dengan mengangsur pinjaman itu setiap bulan, ia akan memiliki barang – barang untuk keperluan anaknya, seperti pakain, buku – buku, sepeda dan sebagainya.

Pengurus koperasi simpan pinjam selalu berusaha supaya bunga diterapkan serendah mungkin agar dirasakan ringan oleh para anggotanya. Selain itu pengurus koperasi harus memperhatikan agar pinjaman itu betul – betul digunakan untuk hal – hal yang bermanfaat.

3. Koperasi produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang – orang anggota koperasi. Contohnya adalah koperasi peternak sapi perah, koperasi tahu tempe, koperasi batik, koperasi petani dan lainnya.

Anggota koperasi produksi terdiri dari orang yang mampu menghasilkan suatu barang atau jasa. Orang tersebut adalah kaum buruh atau kaum pengusaha kecil. Oleh sebab itu kita mengenal dua macam koperasi produksi, yaitu :

a. Koperasi produksi kaum buruh yang anggotanya adalah orang – orang tidak mempunyai perusahaan sendiri. Anggota koperasi ini terdiri dari kaum buruh yang masing – masing memiliki keterampilan tertentu, bersama mereka mengumpulkan modal dan membangun sebuah perusahaan bersama.
b. Koperasi produksi kaum produsen yang anggotanya adalah orang yang masing – masing mempunyai perusahaan sendiri. Mereka pada umumnya adalah kaum produsen kecil, seperti koperasi produksi pertanian, anggotanya adalah para petani

produsen pertanian, koperasi perikanan, koperasi peternakan, koperasi produksi kerajinan/industri dan sebagainya.

Koperasi produksi yang berkembang saat ini bukanlah koperasi produksi menururt cita – cita aslinya, akan tetapi dapat disebut sebagai koperasi produsen. Dimana produsen membentuk suatu koperasi yang membantu anggotanya untuk memperlancar usaha produksinya dengan jalan menyediakan bahan baku.

4. Koperasi jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggotanya maupun masyarakatat umum. Contohnya adalah koperasi angkutan, perencanaan dan konstruksi bangunan, jasa audit, asuransi, perumahan nasional, jasa untuk mengurus dokumen seperti SIM, STNK, Paspor, Sertifikat tanah dan lainnya.

Jenis koperasi jasa ini dapat kita jumpai antara lain pada pemberi jasa di air atau di darat. Misalnya koperasi angkutan bogor, yang memberikan pelayanan atau jasa angkutan yang mengoperasikan kendaraan bermotor angkutan penumpang di kota Bogor atau Kopaja (Koperasi Angkutan Jakarta) yang mengoperasikan bus – bus mini di beberapa trayek di dalam kota Jakarta.

5. Koperasi Serba Usaha/Koperasi Unit Desa (KUD)

Untuk meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan koperasi desa (KUD), satu unit desa terdiri dan bebrapa desa dalam satu kecamatan yang merupakan satu kesatuan potensi ekonomi. Untuk satu wilayah potensi ekonomi ini dianjurkan membentuk satu

koperas unit desa. Dan apabila potensi ekonomi satu kecamatan memungkinkannya. Maka dapat dibentuk lebih dari satu KUD. Dengan demikian ada kemungkinan satu KUD meliputi satu atau beberapa desa saja, tetapi dharapkan agar dapat meliputi semua desa atau kecamatan.

Pengelompokan koperasi ke dalam kelompok-kelompok tertentu dilakukan berdasarkan kriteria dan karakteristik tertentu. Jenis koperasi sangat beragam tergantung dari latar belakang dan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan keragaman latar belakang dan tujuan tersebut penggolongan koperasi dapat dilakukan berdasarkan berbagai pendekatan.

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian perangkat organisasi terdiri dari rapat anggota,pengurus dan pengawas, rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, di dalam Rapat anggota menentukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Anggaran Dasar;
2. kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi;
3. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
4. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
5. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
6. pembagian sisa hasil usaha;
7. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

Berdasarkan penjelasan diatas dijelaskan bahwa rapat anggota menentukan kebijakan yang ada di koperasi, seperti anggaran dasar, kebijakan umum, pemilihan dan pemberhentian pengurus, rencana kerja, pembagian hasil, dan pembubaran koperasi.

Koperasi sebagai badan usaha memiliki pengawas, pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada rapat anggota. Persyaratan untuk dipilih menjadi pengawas ditetapkan di dalam anggaran dasar,pengawas bertugas untuk :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Pengawas juga memiliki kewenangan antara lain :

1. Meneliti catatan yang ada di koperasi;
2. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Berdasarkan keterangan diatas dijelaskan bahwa pengawas koperasi memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan koperasi dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya, pengawas juga memiliki kewenangan seperti meneliti catatan yang ada di koperasi dan mendapat segala keterangan yang diperlukannya untuk melaksanakan kewenangan pengawas koperasi.

Koperasi mempunyai pengurus yang dipilih dari rapat anggota oleh anggoa koperasi, persayaratan untuk menjadi pengurus ada di dalam anggaran dasar koperasi. Pengurus bertugas untuk :

1. Mengelola Koperasi dan usahanya;
2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
3. menyelenggarakan Rapat Anggota;
4. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
5. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
6. memelihara daftar buku anggota dan pengurus

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengurus koperasi memiliki tugas untuk mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan rapat anggota,

mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal, selain itu koperasi juga mempunyai beberapa sumber modal yaitu :

1. Simpanan pokok;
2. Simpanan wajib;
3. Dana cadangan;
4. Hibah.

Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari :

1. Anggota;
2. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
3. Bank dan lembaga keuangan lainnya;
4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
5. Sumber lain yang sah.

Berdasarkan keterangan diatas dijelaskan bahwa modal koperasi tidak hanya dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi, modal koperasi juga bisa datang dari hibah, modal penyertaan dan modal pinjaman yang berasal dari anggota, koperasi lainnya, bank, dan pemerintah.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penilaian tentang pemberdayaan yang di berikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM kepada Koperasi di Kabupaten Bandung Barat harus di lihat dari beberapa kriteria. kriteria dalam penilaian tersebut menunjukan sejauh mana upaya pemberdayaan yang di berikan kepada koperasi guna meningkatkan eksistensi koperasi yang mandiri dan mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Bandung

Barat. Berdasarkan uraian di atas, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Pemberdayaan masyarakat yang baik harus melalui beberapa proses, dan untuk melalui proses tersebut Pemerintah harus melakukan beberapa pendekatan, Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat,ada beberapa aspek pemberdayaan yang dapat dilakukan melalui lima pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, untuk mempermudah alur berfikir penelitian ini, maka peneliti merumuskan definisi konsep sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat adalah Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan efektivitas Koperasi di Kabupaten Bandung Barat dengan cara mengadakan pelatihan – pelatihan manajemen Koperasi. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu :
    1. Pemungkinan

        Pemungkinan adalah upaya Dinas Koperasi dan UMKM dalam menciptakan suasana atau iklim perkoperasian yang kondusif di Kabupaten Bandung Barat sehingga dapat memaksimalkan potensi Koperasi di Kabupaten Bandung Barat.

    2. Penguatan

        Penguatan adalah upaya Dinas Koperasi dan UMKM dalam menguatkan pengetahuan pengurus Koperasi di Kabupaten Bandung

Barat dengan cara memberikan pelatihan atau bimbingan teknis guna meningkatkan efektivitas Koperasi di Kabupaten Bandung Barat.

3. Perlindungan

Perlindungan adalah upaya Dinas Koperasi dan UMKM dalam melindungi Koperasi di Kabupaten Bandung Barat agar tidak semakin melemah dan dapat bersaing dengan sehat.

4. Penyokongan

Penyokongan adalah upaya Dinas Koperasi dan UMKM dalam mendukung atau membimbing Koperasi untuk mengembangkan atau meningkatkan potensi yang mereka miliki guna meningkatkan efektivitas Koperasi di Kabupaten Bandung Barat.

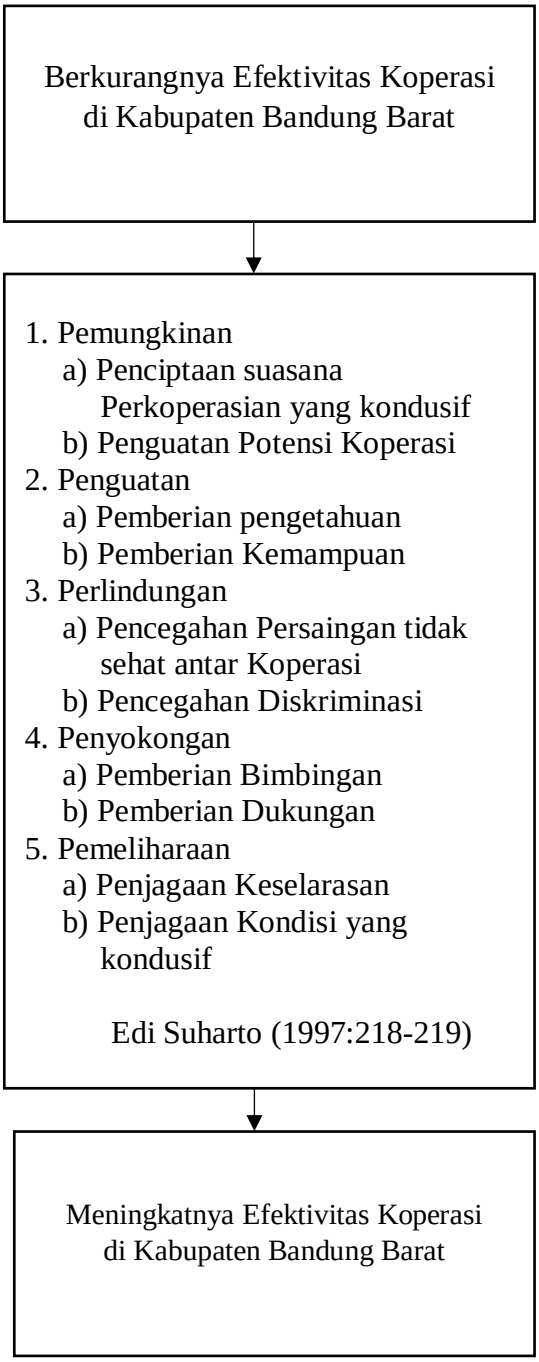
5. Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah upaya Dinas Koperasi dan UMKM untuk menjaga keselarasan suasana perkoperasian di Kabupaten Bandung Barat.

2. Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
3. Efektivitas adalah ketepatan produkifitas Koperasi di Kabupaten Bandung Barat dalam menjalankan perannya untuk melayani anggota nya dan juga masyarakat serta ikut serta dalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka peneliti memberikan gambaran model kerangka pemikiran yang menjelaskan bahwa pemberdayaan yang mengikuti lima pendekatan yang disebutkan diatas akan menghasilkan *output* yang baik kepada Koperasi di Kabupaten Bandung Barat yang di gambarkan dalam model kerangka pemikiran sebagai berikut.

Bagan 2.1
Model Kerangka Pemikiran



2.3 Proposisi

Berdasarkan Uraian diatas maka proposisi penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Koperasi dan UMKM guna meningkatkan efektivitas Koperasi di Kabupaten Bandung Barat ditentukan oleh pendekatan pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharan.